

SISTEM INFORMASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

MUHAMMAD YASSIR¹, AGUNAWAN², GAFUR³, ABD. RAHMAN⁴,
ITA FITRIATI⁵

^{1,2}Sistem dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Dan Bisnis Nobel

³Teknik Informatika, Universitas Inonesia Timur

⁴Teknik Informatika, Universitas Teknologi Akba Makassar

⁵STKIP Taman Siswa Bima

Email : ¹myassir669@gmail.com, ²agunawan108@gmail.com,

³mgafur@gmail.com, ⁴abdrahman@unitama.ac.id

⁵itafitriati88@gmail.com,

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi sistem informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berbasis elektronik di Kabupaten Polewali Mandar sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi. Metode Waterfall digunakan dalam pengembangan sistem ini, yang melibatkan tahap identifikasi masalah, perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML), implementasi, dan pengujian menggunakan metode black box testing. Hasilnya adalah sebuah sistem yang memungkinkan pengelolaan data LAKIP secara efisien dan transparan, dengan antarmuka yang user-friendly dan pengujian yang memastikan kinerja yang sesuai. Sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintah melalui peningkatan transparansi, efisiensi, dan integrasi dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah.

Kata kunci : *E-Government, Lakip, System Information, Waterfall*

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, kemajuan dalam komunikasi dan teknologi komputer telah mengubah pemerintahan pemerintah Indonesia. Pemerintah mendorong implementasi teknologi untuk meningkatkan layanan pemerintah. Layanan publik yang lebih baik akan dibuat ketika ada pemerintahan yang baik (Dorania Lumbanraja, 2020). Oleh karena itu, pemerintah harus memperbaiki sistem birokrasi yang ada untuk mencapai tujuan itu. ICT dalam pemerintahan adalah salah satu fenomena yang paling penting dari abad ke-21. Ini memiliki kemampuan untuk mengubah “wajah” pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, gagasan e-government tumbuh dengan cepat (Tifany et al., n.d.).

Sebagai pilot dari Proyek Reformasi Birokrasi, pemerintah daerah Polewali Mandar telah merumuskan kebijakan tentang e-government sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Kebijakan tersebut harus didukung dengan menyediakan aplikasi untuk implementasi pemerintahan administratif berdasarkan sistem informasi manajemen. Salah satu prioritas administrasi adalah pengembangan Sistem Informasi Laporan Akuntabilitas Prestasi Lembaga Pemerintah (LAKIP).

LAKIP adalah gambaran keseluruhan kinerja yang dicapai oleh lembaga pemerintah. LAKIP menjadi alat penting untuk evaluasi dan umpan balik bagi semua stakeholder pemerintah (Eko Setiawan et al., n.d.). Sebagai gambaran kinerja, LAKIP menunjukkan kinerja yang dicapai oleh lembaga pemerintah dalam memenuhi tugas dan tujuan pemerintah. Dalam beberapa hal, pentingnya LAKIP dapat dipahami sebagai salah satu kondisi dalam evaluasi dan umpan balik bagi stakeholder pemerintah, sehingga memastikan bahwa agen pemerintah merespon kewajiban pemerintah dengan transparansi dan akurasi (Ekonomi et al., 2023). Pemerintah sebagai pegawai negeri terus memberikan pelayanan terbaik. Di era revolusi industri 4.0 ini, seluruh sektor dipaksa untuk beralih ke organisasi digital, termasuk sektor pemerintah (Yassir, Jamada, et al., 2023)(Yassir, Suhada, et al., 2023).

Proses penulisan LAKIP di Kabupaten Polewali Mandar sebelumnya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Awalnya, Organisasi Perangkat Regional yang menangani ini tidak menemukan hambatan ketika memasukkan data yang diperlukan. Tetapi karena data dan kebutuhan pengguna menjadi semakin kompleks, kita membutuhkan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara efektif dan efisien. Sistem ini diharapkan menjadi perangkat lunak dalam bentuk database client-server berbasis website di mana semua permintaan client disampaikan oleh server melalui akses jaringan Internet. Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah untuk memfasilitasi aparatur sipil negara dalam implementasi sistem manajemen skrip layanan berdasarkan sistem informasi manajemen dan untuk menyediakan sistem informasi yang dapat mendukung

efektivitas dan efisiensi kinerja aparat sipil Negara di lingkup pemerintah kabupaten Polewali Mandar.

LAKIP memungkinkan lembaga pemerintah untuk melonggarkan pengiriman informasi kinerja, sehingga para pemangku kepentingan pemerintah dapat lebih akurat dan transparan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. LAKIB memungkinkan integrasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan dan manajemen kinerja, seperti pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan, dan lembaga pemerintah. Ini berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengukur kinerja kegiatan dan memainkan peran dalam pelaksanaan evaluasi yang memberikan efektivitas, peningkatan sumber daya manusia, akuntabilitas, dan layanan publik (Widianto & Dan, n.d.).

Secara keseluruhan, LAKIP adalah alat penting dalam evaluasi dan umpan balik dari semua stakeholder pemerintah dan memainkan peran kunci dalam meningkatkan transparansi, kelancaran, integrasi, efisiensi, dan kapasitas dalam penilaian dan pengambilan keputusan dalam pengembangan kinerja pemerintah dan manajemen.

LAKIP adalah gambaran keseluruhan kinerja yang dicapai oleh lembaga pemerintah dan memainkan peran penting dalam evaluasi dan umpan balik dari semua stakeholder pemerintah. Dalam konteks ini, input elektronik LAKIP telah menjadi penting karena mereka memungkinkan proses pengembangan dan manajemen kinerja yang lebih efisien, akurat, dan real-time. Berikut adalah beberapa poin penting tentang LAKIP berbasis elektronik: Pertama, input LAKIP berbasis elektronik memungkinkan lembaga pemerintah untuk mengakses dan mengelola kinerja secara real-time, sehingga memudahkan stakeholder pemerintah untuk membuat keputusan lebih cepat dan efisien dan untuk memindahkan akses yang diperlukan. Kedua, transparansi: input elektronik memungkinkan pemerintah untuk mengkomunikasikan informasi kinerja dengan cara yang transparan dan akurat kepada publik, sehingga menciptakan penawaran yang lebih baik dan mendukung pengambilan keputusan. Ketiga, integrasi: input LAKIP berbasis elektronik memungkinkan integrasi yang lebih baik antara berbagai pihak yang

terlibat dalam pengembangan dan manajemen kinerja, seperti pemerintah, badan penelitian dan pengembangan, dan lembaga pemerintah.

Keempat, *Smooth*. Input elektronik LAKIP memungkinkan lembaga pemerintah untuk melonggarkan pengiriman informasi kinerja, sehingga para pemangku kepentingan pemerintah dapat lebih akurat dan transparan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Kelima, evaluasi dan pengambilan keputusan. Input elektronik LAKIP memungkinkan lembaga pemerintah untuk memantau, mengukur kinerja, dan memainkan peran dalam melakukan evaluasi yang memberikan efektivitas, peningkatan sumber daya manusia, akuntabilitas, dan layanan publik.

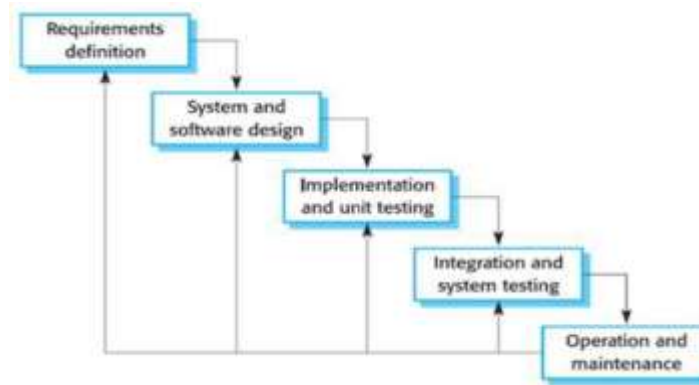
Tahap terakhir dalam memastikan bahwa sistem bekerja dengan benar atau tidak adalah ketika perlu diuji. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fitur-fitur fungsional software yang ada. Ini biasanya menemukan kesalahan seperti fungsi yang tidak akurat atau tidak ada, kesalahan struktur data, kesalahan akses database, kesalahan antarmuka, kesalahan kinerja, dan kesalahan inisialisasi dan pengakhiran. Metode pengujian kotak hitam memiliki beberapa keuntungan: (1) penguji tidak perlu tahu bahasa pemrograman tertentu; (2) pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna, yang membantu menemukan ambiguitas atau ketidaksesuaian dalam spesifikasi persyaratan; dan (3) programmer dan penguji saling bergantung (Rahadi & Vikasari, 2020) (Yulistina et al., 2020).

Oleh karena itu, perlu untuk membangun dan menerapkan sistem informasi untuk pengumpulan data dan penilaian akuntabilitas kinerja Unit Kerja Perangkat Regional (SKPD). Sistem informasi ini memiliki tampilan yang user-friendly, sehingga memudahkan pemerintah untuk menggunakannya (Yassir, 2023)(Yassir, n.d.).

II. METODE PENELITIAN

Untuk menciptakan sistem informasi LAKIP, penelitian ini menggunakan metode Waterfall, yang merupakan model pengembangan sistem informasi yang

sistematis dan berurutan (Adi et al., 2024; Rumetna et al., 2022). Peraturan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Waterfall Method Flow

- 1) Pada tahap ini, mengidentifikasi masalah yang ditemukan dan merencanakan bagaimana sistem akan dibangun. Proses pengumpulan data dari Kantor Sekretariat Regional Mandar Polewali dilakukan melalui wawancara langsung dengan lima sumber, yaitu Sekretaris Regional, Kepala Bagian Organisasi dan Eksekutif, Kepala Perencanaan Pembangunan Regional, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan dua staf.
- 2) Langkah kedua melibatkan merancang sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML), PostgreSQL untuk desain database, dan Macromedia Dreamweaver CS 6 untuk desain antarmuka.
- 3) Langkah ketiga melibatkan menerapkan sistem menggunakan keputusan desain yang ditetapkan dalam fase kedua, dan melibatkan konfirmasi bahwa setiap unit program mematuhi persyaratan dan desain.
- 4) Pengujian kotak hitam adalah metode uji yang digunakan dalam langkah keempat, yaitu pengujian sistem. Tes ini dijalankan untuk memastikan bahwa semua komponen sistem bekerja seperti yang dimaksudkan dan untuk memeriksa masalah apa pun dengan sistem.
- 5) Jika sistem telah dioperasikan, maka sistem sudah bisa diterapkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini membahas persyaratan sistem, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, UML, tampilan sistem informasi, dan pengujian sistem.

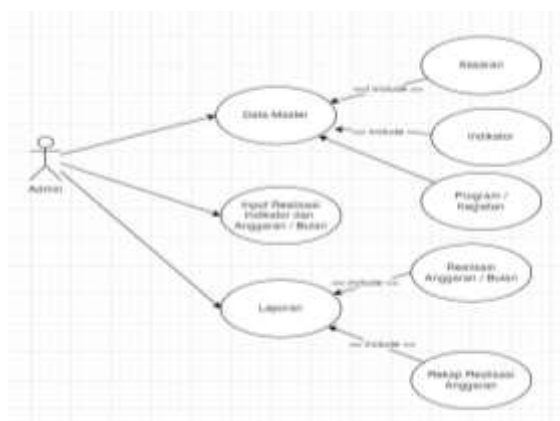
A. System prerequisites

Persyaratan sistem adalah:

- 1) Spesifikasi perangkat keras termasuk satu MacBook Pro 13 inci dengan layar Retina dari awal 2015. Prosesor: Intel Core i5 Dual-Core 2.7 GHz RAM 8 GB DDR3 1867 MHz 256 GB penyimpanan flash.
- 2) MacOS Catalina versi 10.15.5, Pinegrow Web Editor, PostgreSQL, Google Chrome Web Browser versi 120 (64-bit).

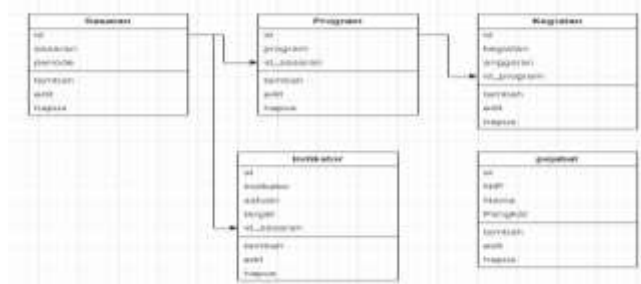
B. Unified Modelling Language (UML)

Dalam penelitian ini, sistem informasi LAKIP dirancang menggunakan UML. *Diagram Usecase* dan diagram aktivitas disertakan dalam bagian ini.



Gambar 2. Usecase Diagram

Diagram Usecase dengan hanya satu aktor, admin, ditampilkan di Gambar 2. Pertama, admin dapat memasukkan data master, seperti target, indikator, dan aktivitas program. Kedua, administrator dapat memasukkan data realisasi anggaran. Ketiga, Admin dapat mencetak laporan realisasi anggaran dan merekamnya.



Gambar 3. Activity Diagram

Diagram aktivitas untuk setiap tugas yang diselesaikan oleh administrator di sistem informasi LAKIP ditampilkan pada Gambar 3. Dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi, administrator dapat mengakses sistem dan mencetak laporan dengan pergi ke halaman utama.

C.Interface Sistem Informasi LAKIP

Gambar di bawah ini menunjukkan seluruh antarmuka sistem informasi LAKIP:



Gambar 4. System Process

Gambar 4 menunjukkan proses sistem dalam e-LAKIP. SKPD mempersiapkan Perjanjian Kinerja (PK), Pernyataan PK, RKT-PK, membuat akun karyawan, input realisasi kinerja, input penggunaan anggaran, Cetak realisasi SKPD, Cetak penggunaan anggaran, menetapkan kata sandi dan penilaian IP. Administrator memasukkan Tujuan Strategis, Indikator, dan Tujuan. Membuat akun SKPD, memantau laporan kinerja dari semua SKPDs, memberikan akses ke indikator untuk semua SKDPs, memonitor anggaran, menetapkan hak akses, memasukkan nama SKPD, memasukkan alokasi anggaran, menetapkan kata sandi, dan menetapkan periode.

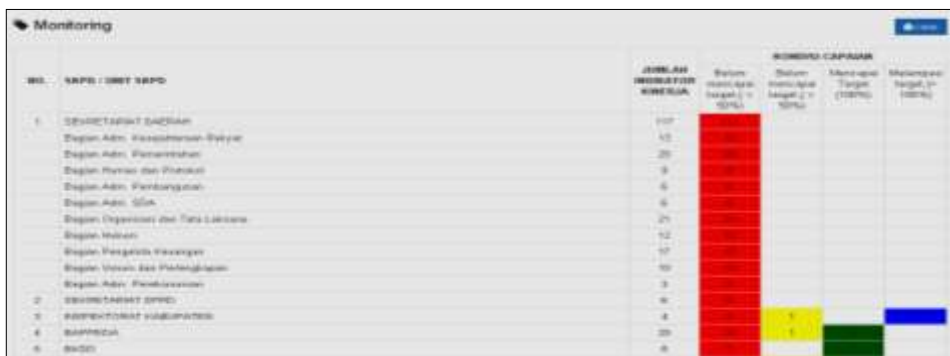
Gambar 5. Login Form

Admin masuk ke sistem menggunakan formulir login admin, yang terlihat di Gambar 5, dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang benar.



Gambar 6. Dashboard

Gambar 6. menunjukkan dashboard, yang berisi menu master dan pengaturan. Master menetapkan izin akses, data karyawan dan data SKPD. Sementara pengaturan memungkinkan pengguna untuk menetapkan periode.



Gambar 7. Indicator Access Monitoring

Gambar 7. menunjukkan akses indikator dari setiap SKPD. Setiap SKPD memiliki sejumlah indikator dan akses kinerja yang berbeda. Jika 50% tidak dicapai, itu merah, jika lebih dari 50% adalah kuning, jika 100% dicapai itu hijau, dan jika melebihi 100% itu biru.

NO.	SAMBA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Beban tercapai target (<50%)	Beban tercapai target (>50%)	Mencapai Target (100%)	Melampaui Target (>100%)
1	Meningkatkan status pertumbuhan, perkembangan, pertumbuhan dan keberuntungan hasil masyarakat	Meningkatnya angka kelahiran bayi dari 11,37 per 1000 menjadi 8,6 per 1000 kelahiran hidup	Angka per 1000 kelahiran	10	100%	0%	0%	0%
		Meningkatnya angka kematian ibu dari 532 per 100.000 menjadi 74 per 100.000 kelahiran hidup	Angka per 100.000 kelahiran	500	100%	0%	0%	0%
		Meningkatnya persentase ibu hamil dan bayi dari 19,32 % menjadi 20,000 %	Persentase	10,000	100%	0%	0%	0%
		Meningkatnya cakupan pelayanan imunisasi lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%	Persentase	90	100%	0%	0%	0%
2	Meningkatkan status kesehatan atau menurunkan angka kesakitan agar masyarakat dapat tetap aktif, produktif serta sosial dan ekonomis	Meningkatnya angka kematian (Annual Potential Inlet-APL) dari 2 (target 1 per 1.000 penduduk)	Angka per 1.000 penduduk	1,3	100%	0%	0%	0%
		Persentase data yang mencapai UKI dari 90% menjadi 90%	Persentase	90	100%	0%	0%	0%
		Meningkatnya angka kesehatan (DALY) dari 70 menjadi 5 per 100.000 penduduk	Angka per 100.000 penduduk	8	100%	0%	0%	0%

Gambar 8. Monitoring Details

Gambar 8. menunjukkan rincian akses dari indikator SKPD. Ini berisi informasi tentang target, indikator, unit, target dan kondisi akses. Persentase akses ditentukan oleh berapa banyak target yang telah tercapai.

IV. KESIMPULAN

Pendekatan *Waterfall* melibatkan tahap-tahap pekerjaan yang harus diselesaikan untuk melanjutkan ke yang berikutnya, cocok untuk studi kasus ini. Karena input dari satu tahap akan menjadi output dari yang sebelumnya, setiap tahap terikat dengan yang lain dan harus dilakukan dengan benar. Sistem informasi yang dikembangkan juga dapat membantu dalam pemrosesan rinci semua data LAKIP di setiap SKPD Polewali Mandar, menghasilkan sistem informasi yang cepat, akurat, dan dapat diandalkan. Secara keseluruhan, input elektronik LAKIP membantu lembaga pemerintah meningkatkan transparansi, efisiensi, real-time, integrasi, dan kelancaran dalam pengembangan dan manajemen kinerja, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kinerja pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. D. P., Khairul, Samsir, S., Harmayani, Edi, F., Purnama, I., Yasir, M., Mappadang, A., Maulana, F. I., Fatah, G. S. A., Louhenapessy, B. B., & Prastiyono, Y. (2024). *Performance of LoRaWAN in Multi-Node*. 1–6. <https://doi.org/10.1109/itis59651.2023.10420407>
- Doramia Lumbanraja, A. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. In *Online Administrative Law & Governance Journal* (Vol. 3).
- Eko Setiawan, A., Gustianing, D., Rizki, F., & Aisyah Pringsewu, U. (n.d.). LAUNCHING DAN SOSIALISASI ELEKTRONIK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (E-SAKIP) DI KABUPATEN PRINGSEWU. *JABB*, 4(1), 2023. <https://doi.org/10.46306/jabb.v4i1>
- Ekonomi, J., dan Akuntansi, M., Rahman, T., Adam, P., Razak, A., & Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari Correspondence, S. (2023). *Neraca Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana* (Vol. 267, Issue 2). <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Rahadi, N. W., & Vikasari, C. (2020). Pengujian Software Aplikasi Perawatan Barang Milik Negara Menggunakan Metode Black Box Testing Equivalence Partitions. *Infotekmesin*, 11(1), 57–61. <https://doi.org/10.35970/infotekmesin.v11i1.124>
- Rumetna, M. S., Lina, T. N., Rajagukguk, I. S., Pormes, F. S., & Santoso, A. B. (2022). Payroll Information System Design Using Waterfall Method.

- International Journal of Advances in Data and Information Systems*, 3(1).
<https://doi.org/10.25008/ijadis.v3i1.1227>
- Sonata, F.-. (2019). Pemanfaatan UML (Unified Modeling Language) Dalam Perancangan Sistem Informasi E-Commerce Jenis Customer-To-Customer. *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 8(1), 22. <https://doi.org/10.31504/komunika.v8i1.1832>
- Widianto, A. R. Z., & Dan, K. (n.d.). *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Berdasarkan Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Deputy Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB)*.
- Yassir, M. (n.d.). Pembangunan Sistem Informasi Akademik (Studi Kasus : STIA AL Gazali Barru). In *Elektronika dan Kendali* (Vol. 08, Issue 03). <https://elektroda.uho.ac.id/>
- Yassir, M. (2023). Pengembangan Aplikasi Pantau Denyut Nadi Pasien. *Jurnal Fokus Elektroda: Energi Listrik ...*, 8(1), 29–33. <https://elektroda.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/46%0Ahttps://elektroda.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/46/25>
- Yassir, M., Jamada, G., & Suhada, S. (2023). Pengembangan sistem informasi tracer doc surat masuk menggunakan framework Scrum. *Jambura Journal of Informatics*, 5(2), 100–107. <https://doi.org/10.37905/jji>
- Yassir, M., Suhada, S., & Fitriati, I. (2023). *Web-Based Information Systems for Political Parties and Community Organizations Using Extreme-Programming Methods I*. 21(2). <https://doi.org/10.37031/jt.v21i2.426>
- Yulistina, S. R., Nurmala, T., Supriawan, R. M. A. T., Juni, S. H. I., & Saifudin, A. (2020). Penerapan Teknik Boundary Value Analysis untuk Pengujian Aplikasi Penjualan Menggunakan Metode Black Box Testing. *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 5(2), 129. <https://doi.org/10.32493/informatika.v5i2.5366>